

BAB II

KAJIAN TEORI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

DALAM KONTEKS KEMAJEMUKAN

A. Kemajemukan Agama Sebagai Konteks PAK

Memahami konteks masyarakat sebelum merumuskan dan mempraktikkan pengajaran PAK adalah sebuah keniscayaan. Pendidikan akan menuju pada idealitasnya jika hadir dan mempertimbangkan konteksnya. Sebab, konteks akan memproses berlangsungnya pendidikan yang hadir di dalamnya. Tanpa memahami konteks masyarakat sebelum merumuskan dan mempraktikkan pengajaran PAK akan menjadikan proses itu mengawang dan berpotensi nihilis. Menurut John M. Nainggolan, merumuskan PAK di Indonesia tidak bisa tidak, harus memperhatikan kemajemukan agama sebagai salah satu lokus utama perumusan PAK yang kontekstual. Menurutnya, merumuskan PAK dengan memperhatikan konteks ini adalah sesuatu yang mendesak saat ini.¹ Orang Kristen tidak dapat lagi mengonstruksi kekristenannya terlepas dari realitas kemajemukan tersebut.

Salah satu karakteristik dominan penganut Kristen dalam berhadapan dengan konteks kemajemukan agama adalah karakteristik eksklusivisme yang fundamentalis. Sebuah karakter yang memahami agama sendirilah yang paling

¹ John M. Nainggolan, *PAK Dalam Masyarakat Majemuk: Pedoman Bagi Guru Agama Kristen Dalam Mengajar*, Bandung: BMI, 2009,57.

benar, sedangkan agama lain sesat; agama lain harus ditakhlukkan. Karakteristik seperti ini sangat berpotensi memicu konflik antar umat beragama.

Konteks kemajemukan agama yang dihadapi dengan sikap eksklusivis inilah yang menjadi tantangan dominan bagi PAK di situasi kemajemukan. Praksis PAK ditantang untuk mampu mentransformasi dirinya untuk dapat menjawab tantangan yang demikian. Dalam uraiannya mengenai hal ini, John M. Nainggolan menegaskan bahwa dalam situasi seperti inilah Pendidikan Agama Kristen harus memainkan peranan yang sangat penting. Setiap generasi yang dididik baik di gereja maupun di sekolah adalah generasi yang hidup dalam konteks yang sangat pluralistik. PAK, menurutnya, tidak lagi dapat mendidik setiap generasi itu dengan mempertentangkan terus-menerus perbedaan di antara agama-agama yang ada; mereka jangan dididik hanya untuk memperlihatkan kelemahan agama lain, sehingga bertemu saja dengan orang yang beragama lain sudah harus alergi dan menghindar.¹⁴

Ada beberapa alasan yang penting untuk dicatat tentang mengapa praksis PAK perlu menanggapi secara serius keberagaman agama dalam masyarakat majemuk, sebagaimana yang diuraikan John M. Nainggolan:

“1) konteks PAK di Indonesia adalah masyarakat multikultural, yang diwarnai dengan kemajemukan dalam agama dan kepercayaan; 2) Adanya hubungan timbal balik antara PAK dan masyarakat multikultural. Di satu sisi, pendidikan memiliki peran signifikan dalam membangun masyarakat multikultural, di sisi lain masyarakat multikultur dengan segala karakternya memiliki potensi signifikan untuk keberhasilan fungsi dan peran PAK; 3) mempelajari satu agama dalam masyarakat majemuk, menjadi kegiatan yang tidak memadai dipandang dari hakikat pendidikan. Mengenal dan memahami apa yang diutamakan dalam agama-agama lain, melalui pendidikan religius yang dapat dipertanggungjawabkan akan

¹⁴ John M. Nainggolan, *Ibid.* 59.

menjadi modal dasar bagi anak didik untuk menjadi warga masyarakat yang cakap menghargai kemajemukan dan dihargai oleh masyarakatnya; 4) orang percaya memerlukan pendidikan religius jika gereja hendak melaksanakan tugasnya di dalam dunia. Data tentang agama lain harus menjadi bagian dari tradisi Kristen, bukan dalam pengertian bahwa semua kebenaran agama sama saja, tetapi oleh karena kemajemukan agama merupakan bagian dari konteks keberadaan gereja dan dari situlah para praktisi PAK harus melakukan tugasnya jika mereka hendak mengartikulasikan tradisi Kristen secara bermakna di dalam masyarakat yang majemuk; 5) fungsi guru perlu dimaksimalkan dengan mengupayakan pemberdayaan melalui kesadaran dan peningkatan wawasan tentang kemajemukan masyarakat serta keterampilan mengelola kemajemukan dalam masyarakat; 6) meningkatkan kesadaran untuk menyebarkan gagasan dan nilai-nilai yang terkait dengan multikulturalisme untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kehidupan bersama yang majemuk; 7) menguatnya wawasan multikulturalisme pada masyarakat luas melalui peran guru-guru agama, baik di sekolah-sekolah maupun dalam masyarakat dan selanjutnya diharapkan bisa meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola berbagai keragaman atas dasar nilai kesetaraan, keadilan, dan demokrasi; 8) akitivitas dialog antaragama dan keyakinan bisa berperan lebih signifikan dalam gerakan sosial untuk perubahan, menuju masyarakat yang toleran, menjunjung nilai-nilai kesetaraan antar manusia dan demokratis; 9) guru agama sebagai pelaksana pendidikan agama di sekolah adalah tokoh kunci yang sangat penting dalam mentransformasikan wacana keagamaan, agar agama-agama tidak menjadi penyekat yang membuat jurang relasi antar kelompok masyarakat. Sebaliknya perlu ada upaya agar dalam masyarakat Indonesia agama bisa meningkatkan peran dalam pendidikan karakter yang sangat dibutuhkan dalam perubahan masyarakat yang berlangsung sangat cepat; 10) guru mengajak siswa untuk menghadapi realitas keragaman dalam masyarakat dengan santun dan adil, tanpa beban-beban batin yang muncul karena prasangka dan salah pengertian antar kelompok keagamaan. Para siswa belajar tentang nilai menghormati perbedaan dengan membangun pengertian yang mendalam, sehingga muncul rasa kasih karena pengertian itu.”¹⁵

Dari seluruh uraian di atas, praksis PAK di seluruh konteks penyelenggaraannya, khususnya di sekolah, harus mempertimbangkan konteks masyarakat di mana PAK itu diselenggarakan. Jika PAK di selenggarakan pada konteks masyarakat majemuk, maka praksisnya puri mesti mempertimbangkan

¹⁵ *Ibid.* 60-61.

secara serius realitas kemajemukan itu sebagai basis atau lokus pengembangannya. Teori pendidikan juga dibentuk oleh konteks masyarakatnya. Teori pendidikan adalah suatu bingkai penuntun untuk secara sengaja merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan, memetakan konteks yang di dalamnya PAK dilaksanakan. Dapat disimpulkan pula bahwa guru agama sebagai pelaksana pendidikan agama di sekolah adalah tokoh kunci yang sangat penting dalam mentransformasikan wacana keagamaan yang eksklusivistik, agar agama-agama tidak menjadi penyekat yang membuat jurang relasi antar kelompok masyarakat. Dengan memiliki wawasan multikultural, para guru diharapkan dapat mengajak siswa untuk menghadapi realitas keragaman dalam masyarakat dengan santun dan adil, tanpa beban-beban batin yang muncul karena prasangka dan salah pengertian antar kelompok keagamaan. Mengembangkan wawasan multikulturalisme pada masyarakat luas melalui peran guru-guru agama, baik di sekolah-sekolah maupun dalam masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola berbagai keragaman atas dasar nilai kesetaraan, keadilan, dan demokrasi.

B. Pendidikan Multikultural: Paradigma PAK Dalam Konteks Masyarakat

Majemuk

Salah satu paradigma yang berkembang dalam dunia pendidikan dan merupakan upaya untuk menjawab tantangan bagi transformasi sosial masyarakat

dengan realita kemajemukan adalah pendidikan multikultural.¹⁶ Pendidikan diyakini sebagai media yang paling tepat untuk membangun kesadaran multikulturalisme. Karena dalam tataran ideal, pendidikan seharusnya bisa menjadi “juru bicara” bagi terciptanya fundamen kehidupan menuju masyarakat multikultural.¹⁷ Menurut John Dewey, yang dikutip HAR Tilaar, prinsip-prinsip utama dalam multikulturalisme seperti pengakuan akan identitas kelompok dan konsep kesetaraan setiap individu bukanlah sesuatu yang sifatnya “*given*”, ataupun demokrasi bukanlah sekedar masalah prosedural atau bentuk pemerintahan semata, tetapi merupakan sebuah cara hidup (*way of life, weltanschauung*) dari suatu komunitas dan anggotanya, tapi merupakan proses internalisasi nilai dalam suatu komunitas, oleh sebab itu, proses pendidikanlah media yang paling tepat dalam rangka proses internalisasi tersebut.¹⁸

Kondisi masyarakat yang plural, baik dari segi budaya, ras, agama, dan status sosial memungkinkan terjadinya benturan antarbudaya, antarras, etnik, agama, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu, dipandang perlu memberikan porsi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Hal ini dapat diimplementasikan baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman.

¹⁶ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, 5.

¹⁷ *Ibid.*, 79.

¹⁸ HAR Tilaar, *Multikulturalisme*, 180.

Ide pendidikan multikulturalisme menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasi UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. Pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.

I

Pengertian pendidikan multikultural sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan banyak pakar pendidikan yang memperdebatkannya. Namun demikian, bukan berarti bahwa definisi pendidikan multikultural tidak ada atau tidak jelas. Sebetulnya, sama dengan definisi pendidikan yang penuh dengan penafsiran antara satu pakar dengan pakar lainnya di dalam menguraikan makna pendidikan itu sendiri. Hal ini juga terjadi dengan pada penafsiran tentang arti pendidikan multikultural. Andersen dan Cusher menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman budaya. Kemudian, James Bank mendefinisikan pendidikan

multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan. Untuk kemudian perbedaan tersebut dapat disikapi dengan penuh toleransi dan semangat egaliter.¹⁹

Pendidikan multikultural mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: tujuannya membentuk “manusia budaya” dan menciptakan “masyarakat berbudaya” (berperadaban), materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis (kultural), metodenya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis, evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap pelaku budaya lain.²⁰ . r-

Mendesain pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antakelompok, suku, etnis, agama, mengandung tantangan yang tidak ringan. Hal ini diperparah jika dalam kondisi masyarakatnya masih penuh dengan berbagai macam diskriminasi, etnosentrisme, prasangka dan stereotip. Dalam kondisi demikian, pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan pendekatan yang tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan semata. Perlunya pandangan yang lebih luas

¹⁹ Cholrul Mahftid, *Pendidikan Multikultural*, 224-225.

²⁰ Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2004), 191-192.

dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah.²¹

Berkaitan dengan anak didik, pendidikan multikultural menyoal tentang etnisitas, gender, kelas sosial, serta agama yang mempengaruhi, membentuk, dan mempola tiap-tiap individu sebagai mahluk budaya. Pendidikan multikultural adalah hasil perkembangan seutuhnya dari interaksi unik masing-masing individu yang memiliki kecerdasan, kemampuan dan bakat. Melalui pendidikan multikultural diupayakan peningkatan kemampuan dan potensi diri untuk berinteraksi dalam lingkungan yang lebih luas (masyarakat).²²

Pendidikan Agama Kristen dalam prakteknya telah dan sedang diselenggarakan, baik pada lingkungan gereja maupun lingkungan sekolah²³, baik sekolah umum ataupun sekolah-sekolah Kristen. Pendidikan Agama dalam ruang publik sekolah resmi hadir sejak 29 Desember 1945, ketika Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan yang berhasil merumuskan sistem dan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah

²¹ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, 183-184.

²² Purwa Hadiwardoyo, "Menolak Diskriminasi, Mendukung Otonomi", dalam ed. Shindunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 81.

²³ Terdapat empat karakter sekolah yang terkait dengan Pendidikan Agama di sekolah. Pertama sekolah negeri, kedua sekolah swasta umum non yayasan agama dan sekolah swasta yayasan agama dan sekolah calon ahli atau pimpinan agama seperti madrasah dan seminari. Varian karakter ini awalnya terbentuk karena perbedaan sumber pembiayaan, pengawasan dan otonomi sekolah, serta misi dan intervensi pada kurikulum.

Pertama yang menggantikan Sekolah Menengah yang diciptakan Jepang. Berdasarkan instruksi 1967 yang berbunyi: “Pendidikan Agama wajib diberikan walaupun dari suatu golongan agama hanya ada seorang pelajar.” Para pemimpin dari setiap agama ditugaskan menyusun kurikulumnya, tetapi pemerintah, berupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Agama, harus menyetujuinya serta menentukan persyaratan untuk melaksanakannya.^{24 25 26}

Pendidikan Agama kemudian menjadi mata pelajaran wajib di sekolah manapun di Indonesia dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi kini. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 berdasarkan kelompok umur 5-19 tahun, terdapat 62 juta siswa di Indonesia. Berarti dalam seminggu minimal selama 2 jam pelajaran terdapat juga 62 juta siswa yang mengkonsumsi Pendidikan Agama. Meski demikian, Pendidikan Agama belum dilirik sebagai “potensi besar” untuk memantapkan paham kemajemukan dari siswa. Sejauh ini, materi yang diajarkan di sekolah-sekolah masih berkutat seputar ritual-ritual. Hal ini terkait erat dengan orientasi Pendidikan Agama yang adalah belajar tentang agama. Agama menjadi terbatas dan berada dalam ruang sempit yang diartikan sebagai seperangkat aturan dan himpunan doktrin yang telah baku dan

²⁴ Listia, *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Multikultur*, dalam <http://www.interllei.or.id/indcx.php?page=article&id=1> download tanggal 30 April 2010.

²⁵ Robert R. Boehlke, *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen, dari Yohanes Amos Comenius sampai Perkembangan PAK di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 807.

²⁶ Suhadi Cholil (ed.), *Resonansi: Dialog Agama dan Budaya: Dari kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural Sampai RUU Anti Pornografi* (Yogyakarta: CRCS, 2008), 29, 32.

diyakini mengandung kemutlakan.²⁷ Ketika seseorang belajar tentang agama, maka hasilnya adalah banyak orang yang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, tetapi kemudian perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diketahuinya itu. Orientasi semacam ini menyebabkan terjadinya keterpisahan dan kesenjangan antara ajaran agama dan realita perilaku pemeluknya.²⁸ Dalam bahasa Djohar M. S., Pendidikan Agama kita sekarang lebih bercorak pengajaran agama, sehingga terjebak pada wawasan dan pengetahuan semata, tanpa coba mengakomodir sisi pendidikan nilai untuk dipraktekkan.²⁹ Hal ini didukung oleh J. Riberu, yang menyatakan bahwa Pendidikan Agama tidak boleh dipahami sebagai pengajaran agama, yakni hanya sebagai pengalihan pengetahuan tentang agama. Bahkan, pengalihan tersebut seringkali berbentuk pengalihan rumus-rumus doktrin dan kaidah susila. Oleh sebab itu, pengajaran agama menghasilkan pengetahuan hafalan yang melekat di bibir dan hanya mewarnai kulit, tetapi tidak mampu mempengaruhi orang yang mempelajarinya.³⁰

Hal ini menurut beberapa praktisi dunia pendidikan merupakan titik lemah penyelenggaraan Pendidikan Agama di Indonesia. M. Amin Abdullah melihat beberapa kelemahan pelaksanaan Pendidikan Agama di sekolah, yaitu: pertama,

²⁷ Ngainum Naim, *Pendidikan Multikultural*, 177.

²⁸ Suhadi Cholil, *Resonansi: Dialog Agama dan Budaya: Dari kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural Sampai RUU Anti Pornografi* (Yogyakarta: CRCS, 2008), 187-188.

²⁹ Djohar M. S disini mengambli model pelaran Agama Islam sebagai contoh. Djohar M. S, "Kurikulum Pendidikan Agama yang Menghargai Kemajemukan" dalam Suhadi Cholil (ed.), *Resonansi*, 45.

³⁰ J. Riberu, "Pendidikan Agama dan Tata Nilai", dalam Sindhunata (editor), *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 189.

Pendidikan Agama lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif serta amalan-amalan ibadah praktis; kedua, Pendidikan Agama kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri anak didik lewat berbagai cara, media, dan forum.^{31 32} Padahal Pendidikan Agama dilihat sebagai sebuah proyek kemanusiaan, yang bertujuan akhir ketika siswa harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya di dalam kehidupan sosialnya. Di samping hal ini, terdapat suatu kelemahan lain yang cukup rentan dari pelaksanaan Pendidikan Agama, secara khusus yang diselenggarakan di sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta umum non yayasan keagamaan, yakni pada jam pelajaran agama siswa dipisah menurut agama yang berbeda-beda. Selama puluhan tahun praktek Pendidikan Agama di sekolah seperti ini belum ada yang memberikan perhatian secara serius bahwa pemisahan siswa pada jam pelajaran agama adalah sebuah pembiasaan dan penanaman kesadaran bahwa agama adalah sesuatu yang memisahkan (kebersamaan) manusia. Hal ini tentu saja bermuatankan unsur-unsur positif dan unsur-unsur negatif yang ada di dalamnya. Namun, terkait dengan pola pendidikan multikultural, pengelompokan pengajaran agama berdasarkan kategori agama masing-masing siswa ini tidak begitu efektif, kalau tidak mau dikata kontradiktif dengan prinsip-prinsip multikulturalisme. Namun hal ini dikaji lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

³¹Ibid., 186.

³² Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005), 134.

Model Pendidikan Agama bukan hanya sekedar pengayaan ilmu agama, tapi lebih strategis diarahkan bagi pengayaan pengalaman ketuhanan. Model Pendidikan Agama seperti ini hanya akan terpenuhi jika guru agama bebas dari beban teologis dan beban birokrasi kurikulum.³³ Dalam melakukan pelaksanaan Pendidikan Agama perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain, pertama, melakukan semacam pergeseran titik perhatian dari agama ke religiusitas. Dalam beragama bukan “*To have religion*”, tetapi “*being religious*.” Dalam “*to have religion*” yang dipentingkan adalah formalisme agama sebagai kata benda; sedangkan dalam “*being religious*” yang dipentingkan adalah penghayatan dan aktualisasi terhadap substansi nilai-nilai luhur keagamaan. Kedua, memasukan kemajemukan agama, sebagai bagian dari proses dalam memperkaya pengalaman beragama. Hal yang penting dari hal ini adalah mengembangkan sikap proaktif dengan cara mengembangkan sikap saling mengerti, bukan sekedar berdampingan secara damai, tetapi saling mengerti.³⁴ Ketiga, menekankan pada pembentukan sikap. Pendidikan Agama yang berlangsung di sekolah selama ini memang lebih cenderung diisi dengan materi agama secara eksplisit tekstual. Pola pembelajarannya pun cenderung menceramahi atau menggurui, bukan membimbing dan mengondisikan anak untuk menumbuhkembangkan potensi diri. Oleh karena itu, perlu dilakukan re-orientasi pembelajaran agama dengan lebih menekankan pada pendekatan induktif-partisipatif, ketimbang pendekatan

³³ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, 268.

³⁴ Y. B. Mangunwijaya, “Pergeseran Titik Berat; dari Keagamaan ke Religiositas” dalam Ahmad Suaedy, et al, *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta: DIAN Interfidei, 1994), 12.

deduktif-normatif.³⁵ Selain itu, Pendidikan Agama di sekolah formal umum perlu juga untuk mempertimbangkan model Pendidikan Agama yang keagamaan, yang mempelajari tentang agama-agama. Pendidikan Agama yang mencari *common ground* dari semua agama. Persoalan seputar dogma, ritual dan tradisi keagamaan merupakan tugas spesifik agama masing-masing (dalam bahasa Djohar M. S. Dipelajari di rumah). Pendidikan Agama di sekolah seharusnya pendidikan untuk mencari *common ground* agama-agama, melaluinya siswa diperlengkapi untuk berdialog dan berinteraksi dengan realitas di sekitarnya, secara khusus realitas keragaman (agama), yang tentunya sejalan dengan ide persatuan dan kesatuan bangsa. Berangkat dari hal ini, seharusnya Pendidikan Agama perlu runtuk merevisi muatan materi pengajarannya, dengan membedakan mana materi primer dan materi sekunder untuk diajarkan di sekolah. Sedangkan kenyataan bahwa pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing siswa berpotensi memunculkan bibit-bibit perpecahan yang akan berbahaya di kemudian hari.³⁶

Aspek demikian yang sangat penting itu berimplikasi juga pada penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen yakni Pendidikan Agama Kristen yang diselenggarakan di sekolah-sekolah harus lebih menekankan etika dari pada dogmatika. Pendidikan Agama Kristen lebih menekankan *axiologia* (ajaran tentang nilai-nilai) daripada *ontologia* (ajaran tentang hakikat sesuatu). Pendidikan Agama Kristen harus mengajar bagaimana Tuhan menyapa kita melalui melalui kehidupan manusia di sekitar kita, manusia yang beraneka ragam,

³⁵ Ngainum Naim, *Pendidikan Muultikultural*, 181.

³⁶ Suhadi Cholil (ed.), *Resonansi*, 42.

baik warna kulitnya, bahasanya, kepercayaannya, budayanya dan bagaimana kita merespons atau menanggapinya.³⁷ Pendidikan Agama Kristen, selain menyajikan bahan-bahan pengetahuan, juga mengusahakan pengalaman dan penghayatan nilai-nilai tersebut.³⁸

Pendidikan Agama Kristen yang berbasis multikulturalisme pada beberapa bagiannya harus pula menjadi media pendidikan perdamaian. Setiap *stake holder* pendidikan tidak hanya diberdayakan untuk mampu melakukan rekonsiliasi, akan tetapi melalui pengalaman bersama (kegiatan berkelompok) dapat berbagi dengan yang lain secara terbuka dan saling memberi dukungan.³⁹ Ideologi Pendidikan Agama Kristen dalam masyarakat multikultural Indonesia adalah sebagai wahana pembentukan moral bangsa. Robert Borrong memberi catatan penting tentang hal ini. Bahwa kita tidak boleh berpikir bahwa bagaimana umat Kristen meimberi sumbangan bagi penguatan moral bangsa tidaklah boleh kemudian berujung pada cap Kristen atau dipahami sebagai sebuah bentuk Kristenisasi.⁴⁰ Atau dalam

³⁷ Judo Poerwowidagdo, “Arah Pendidikan Agama Kristen dan Kurikulumnya dalam Memasuki Era Cyber Space Abad XXI”, dalam Kadamanto Hardjowasito, Jan S. Aritonang dan Martin L. Sinaga (penyunting), *Memperlengkapi bagi Pelayanan dan Pertumbuhan: Kumpulan Karangan Pendidikan Kristiani dalam Rangka Penghormatan kepada Pdt. Prof. Dr. Robert R. Boehlke* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 63.

³⁸ J. Riberu, “Pendidikan Agama dan Tata Nilai”, dalam Sindhunata (editor), *Pendidikan*, 190.

³⁹ Ruth kadamanto, “Pendidikan Perdamaian bagi Anak, dalam Kadamanto Hardjowasito, Jan S. Aritonang dan Martin L. Sinaga (penyunting), *Memperlengkapi*, 150.

⁴⁰ Robert Borrong, Partisipasi Kristen dalam Membangun Moral bangsa Indonesia, dalam Kadamanto Hardjowasito, Jan S. Aritonang dan Martin L. Sinaga (penyunting), *Ibid.*, 313-314.

bahasa Professor John Titaley, sebagai upaya mengagamakan Pancasila.⁴¹ Nilai-nilai moral dari agama Kristen ini, oleh Robert Borrong, disebut sebagai nilai (norma moral) universal yang ada dalam agama Kristen dapat disumbangkan sebagai praktek hidup berbangsa dan bernegara, seperti pencapaian kehidupan yang baik dan benar, sifat dan perilaku jujur, adil dan penuh cinta kasih.⁴²

Pendidikan Agama Kristen tidak boleh hanya menjadi media indoktrinasi (seperti yang berlangsung selama ini), tetapi harus lebih merupakan media internalisasi nilai. Jika Pendidikan Agama Kristen diselenggarakan sebagai media indoktrinasi, melalui pengajaran doktrin-doktrin Kristen, ritual keagamaan semata maka akan melahirkan kader-kader Kristen yang pintar menghafal semua ajaran dalam kekristenan, tetapi tidak menghidupinya dalam praktek kehidupan. Hal ini berimplikasi lebih jauh, seseorang dapat saja melakukan kewajiban formal keagamaan secara sangat saleh, tetapi dalam tingkah lakunya bisa sangat bertolak belakang dengan apa yang diketahuinya. Pendidikan Agama Kristen semestinya menjadi media internalisasi nilai, di mana Pendidikan Agama Kristen diselenggarakan dengan tujuan mengkader generasi bangsa yang beridentitaskan Kristen dan berwawasan Pancasila.

Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Pendidikan Agama berbasis multikulturalisme dimulai dengan adanya perubahan paradigma dan pola pikir

⁴¹ Konsep mengagamakan Pancasila atau mempancasilakan agama bukanlah tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen, yang oleh kami dipahami sebagai Pendidikan Agama berbasis multikultural. Lihat John A. Titaley, *Pokok Pikiran*, 29.

⁴² Robert Borrong, "Partispasi dalam Kadarmanto (ed.), *Memperlengkapi*, 313.

dalam menyikapi kemajemukan agama dalam sistem pendidikan. Wawasan pluralisme, inklusivisme, toleransi dan nonsektarian perlu dikembangkan sebagai wujud nyata motto kebangsaan Indonesia, Bhineka Tunggal Ika.⁴³

C. Pluralisme Sebagai Model Kebersesamaan Yang Ideal

*

Ada minimal tiga model kebersesamaan dalam hubungannya dengan konteks masyarakat majemuk. Tiga model kebersesamaan ini terdiri dari model eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Model yang pertama dideskripsikan sebagai sikap masyarakat yang tertutup, fanatis, dan intoleran terhadap perbedaan, keragaman atau kemajemukan. Ekspresi orang atau masyarakat yang hanya mengakui agamanya sebagai agama yang paling benar dan paling baik. Kebenaran di dalam agama-agama lain tidak ada. Model eksklusivisme ini merupakan model umum yang ada sejak abad pertengahan dan hingga saat ini relatif masih dominan dihidupi oleh beberapa pemeluk atau kelompok agama-agama di dunia termasuk di Indonesia.⁴⁴ Pola semacam ini, menurut Nainggolan, turut mempengaruhi pengajaran dan bimbingan agama, baik secara formal dalam dunia pendidikan, maupun secara nonformal pengajaran agama di keluarga dan masyarakat⁴⁵

Model kebersesamaan yang kedua, yakni model inklusivisme. Model ini dalam konteks relasi dengan orang lain yang berbeda agama sudah terdapat sikap mau memahami dan menghargai agama lain dengan eksistensinya, tapi tetap

⁴³ Dalam bukunya, Syamsul Ma'arif menggunakan istilah "Pendidikan Pluralisme" sebagai bentuk penjabaran dari "Pendidikan Multikultural." Lihat Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005), 8-9.

⁴⁴ John M. Nainggolan, *Ibid.* 31.

⁴⁵ *Ibid.* 46.

memandang agamanya sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Jika dibandingkan dengan model pertama, model yang kedua ini lebih baik, karena di dalamnya telah terdapat sikap mau memahami dan menghargai kehadiran orang lain yang berbeda agama.

Sedangkan model pluralisme sebagai model kebersesamaan yang ketiga, merupakan model yang medeskripsikan masyarakat yang sudah dapat menerima, menghargai, dan memandang agama lain sebagai agama yang baik serta memiliki jalan keselamatannya sendiri. Dalam model kebersesamaan yang pluralistis, tiap umat beragama merasa terpanggil untuk membina kerukunan, solidaritas, dialog, dan kerjasama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih berpengharapan dengan penganut agama lain. Dalam model kebersesamaan yang pluralistis, kemajemukan dipandang sebagai keunikan sekaligus kekayaan yang harus disyukuri.

Jika dibandingkan dengan model yang pertama dan yang kedua, model pluralisme ini lebih jujur-terbuka dalam hal mengakui dan menghargai kemajemukan agama. Komitmen kebersesamaan antar masyarakat yang berbeda agama dalam model pluralistis dibangun oleh semangat egaliter, toleransi, dan solidaritas yang tinggi dan secara terus-menerus dibangun dalam rangka memperkuat sendi-sendi kehidupan sebuah bangsa atau masyarakat. Pola seperti inilah yang diharapkan mempengaruhi praksis PAK, baik dalam keluarga, di masyarakat, dan khususnya praksis PAK di sekolah. Sebab dengan demikian, praksis PAK sungguh-sungguh dapat, berperan meningkatkan kesadaran masyarakat partisipannya untuk menyebarkan gagasan dan nilai-nilai yang terkait

dengan kesetaraan, toleransi,” dan solidaritas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kehidupan bersama yang majemuk.

D. Kebersesamaan Menurut Alkitab: Landasan Teologis-Pedagogis Bagi PAK dalam Masyarakat Majemuk

Hal yang diuraikan dalam bagian ini adalah perspektif alkitabiah tentang kebersesamaan atau model kebersesamaan yang dituntut oleh Alkitab. Dalam penegasan Yesus mengenai hukum yang terutama sebagaimana yang direkam oleh Injil dengan jelas mengatakan bahwa, kasih kepada Allah adalah kasih yang sama, korelatif dan koheren dengan kasih terhadap diri sendiri dan sesama manusia (bnd., Mat. 22:37-40; Mrk. 12:28-34; dan Luk. 10:25-28). Kasih terhadap sesama manusia itu, adalah kasih yang tanpa sekat, tanpa batas, tanpa jurang pemisah karena alasan-alasan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Karena dipahami pula bahwa Allah sebagai Kasih itu sendiri adalah Allah yang menciptakan semua makhluk dan baik bagi semua yang diciptakan-Nya. Allah adalah Allah yang mengasihi semua manusia apapun suku, agama, ras, dan golongannya.

Di samping itu, Yesus mengatakan pula bahwa di kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Penekanan Yesus pada kedua hukum ini, menyatakan bahwa kedua hukum inilah yang menjadi inti sari dari seluruh hal yang dituntut oleh Allah dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika orang Kristen mau mengikut dan mengasihi Yesus secara sejati, maka secara

niscaya mereka mesti menuruti tuntutan dari hukum kasih tersebut dengan penuh komitmen dan konsistensi.

Konsekuensi logis dari menuruti tuntutan hukum kasih adalah, mengubah dan melampaui model kebersesamaan yang eksklusivis dan mulai membuka diri bagi model kebersesamaan yang lebih pluralistik. Toleransi dan solidaritas kepada orang lain harus menjadi sikap yang tidak bisa dihindari sebagai seorang pengikut Yesus yang sejati (bnd. Mat. 25:31-45).

Kisah lain yang dicatat oleh Alkitab, yang sering dijadikan rujukan alkitabiah saat memperbincangkan mengenai hidup dalam kemajemukan adalah “Perumpamaan Orang Samaria Yang Baik Hati” (Luk. 10:25-37). Melalui perumpamaan ini ditampilkan sebuah sikap yang toleran dan penuh solidaritas terhadap orang lain tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama sebagai kendala untuk mengekspresikan cinta kasih. Ketergerakan hati oleh belas kasih dari orang Samaria terhadap sesamanya itu, adalah ketergerakan hati yang semestinya dimiliki oleh semua orang, termasuk oleh orang Kristen saat memandang sesamanya manusia. Harus dipahami bahwa harkat dan martabat setiap manusia (apapun agamanya) adalah harkat dan martabat yang diberikan oleh Allah Yang Esa, yang sudah selayaknya dihormati, dihargai, dan dikasihi secara sama, seperti saat mengasihi diri sendiri dan terlebih sebagai wujud kasih yang konkret kepada Allah (bnd. Imamat 19).

Menjadi jelas bahwa dari tiga model kebersesamaan (eksklusivisme,
H
inklusivisme, dan pluralisme) yang telah dipaparkan sebelumnya, pluralisme

merupakan tuntutan yang harus ditindaklanjuti oleh setiap orang, khususnya orang Kristen dalam rangka hidup bersesama dengan orang lain dan sekaligus menjawab panggilan dan tuntutan Allah sebagaimana yang dinyatakan oleh hukum kasih, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan golongan.

Tidak dapat diulangi lagi kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Israel dalam sejarahnya. Dengan klaim umat pilihan mereka memelihara sikap eksklusivis mereka dengan rapi. Mereka memisahkan diri dari bangsa-bangsa yang mereka anggap “kafir” bahkan memusuhi mereka. Mereka lupa bahwa keterpilihannya adalah untuk menjadi media berkat Tuhan bagi semua bangsa (bnd. Kej. 12:1-9).